

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

2.11 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tenaga Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumenep selama periode 1945–2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM—yang mencerminkan perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli—secara nyata mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Semakin baik kualitas sumber daya manusia, semakin besar peluang masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan. Temuan ini konsisten dengan teori pembangunan manusia oleh Todaro dan Smith (2011) serta didukung oleh penelitian Mukhtar dkk. (2023) dan Jayadi & Brata (2016), yang menegaskan bahwa peningkatan kualitas manusia merupakan faktor utama dalam mengurangi kemiskinan.
2. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Artinya, kenaikan PDRB belum mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum inklusif karena lebih banyak dinikmati oleh kelompok ekonomi menengah ke atas, sementara sektor padat karya yang menjadi sandaran masyarakat miskin masih belum produktif dan rentan terhadap fluktuasi pasar maupun kondisi alam. Hasil ini mendukung

pandangan Tambunan (2011) serta teori Kuznets (dalam Anjuli & Fitrayati, 2013) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan dapat memperbesar ketimpangan dan tidak otomatis menurunkan angka kemiskinan.

3. Tenaga Kerja berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja tidak cukup kuat untuk menekan angka kemiskinan. Sebagian besar tenaga kerja di Sumenep masih terserap pada sektor berproduktivitas rendah seperti pertanian, perikanan, dan sektor informal, sehingga meskipun jumlah penduduk bekerja meningkat, pendapatan yang diperoleh sebagian besar masih berada di bawah standar kesejahteraan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Prasetyo & Firdaus (2019) serta Suharyadi & Purwanto (2021), yang menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja yang meningkat tanpa diiringi peningkatan kualitas dan produktivitas tidak akan menghasilkan dampak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep tidak hanya bergantung pada laju pertumbuhan ekonomi, melainkan lebih ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketersediaan lapangan kerja yang produktif. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang menekankan pada peningkatan IPM, penguatan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, serta pemerataan hasil pembangunan ekonomi akan menjadi langkah strategis untuk menekan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

2.12 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat

menjadi masukan bagi pemerintah daerah, masyarakat, maupun pihak-pihak terkait dalam upaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep perlu terus memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat untuk memperkuat IPM, mengingat variabel ini terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Upaya seperti perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas sarana kesehatan, penguatan program nutrisi, dan pemberdayaan ekonomi keluarga sangat penting untuk memastikan peningkatan IPM berlanjut dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
2. Pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berorientasi pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berpendapatan rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, sehingga penting bagi pemerintah untuk mengembangkan pertumbuhan yang inklusif. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM, serta kemampuan inovasi ekonomi lokal agar manfaat pembangunan tidak hanya terpusat pada kelompok ekonomi tertentu.
3. Dalam aspek ketenagakerjaan, peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat. Meski variabel tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dalam penelitian ini, peningkatan kualitas melalui pelatihan keterampilan, vokasi, dan peningkatan kompetensi akan membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif. Pemerintah

juga perlu mendorong perluasan kesempatan kerja formal dengan upah layak serta mengembangkan sektor-sektor ekonomi kreatif dan industri kecil yang mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.